

**PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh :

KARMANI
NIM. 1321700029

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

TESIS

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Diajukan Oleh :

KARMANI
NIM. 1321700029

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan

Surabaya, Juli 2019

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
Pembimbing I



Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., M.H.
Pembimbing II



TESIS

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Diajukan Oleh :

KARMANI

NIM. 1321700029


Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 20 Juli 2019

TIM PENGUJI :

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.
Ketua



Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
Anggota



Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.
Anggota

Mengesahkan :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : KARMANI
NIM : 1321700029
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul :

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Juli 2019

Hormat saya,



KARMANI
KARMANI



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARMANI
NBI : 1321700029
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTEK HUKUM
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive**

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive
Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Yang Menyatakan,



KARMANI

**PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**



Oleh:

KARMANI

NIM. 1321700029

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

TESIS

**PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

Diajukan Oleh:

KARMANI
NIM. 1321700029

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan:

Surabaya, Juli 2019

Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum

Pembimbing I

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, M.H

Pembimbing II

TESIS

**PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

Diajukan Oleh:

KARMANI
NIM. 1321700029

**Telah dipertahankan di Depan Penguji dan
dinyatakan lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya
Pada tanggal : 20 Juli 2019
Tim Penguji :**

Dr. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum

.....

Ketua

Dr. Otto Yudianto, SH.,M.Hum

.....

Anggota

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH.,M.Hum

.....

Anggota

**Mengesahkan,
Program Studi Migister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : KARMANI

NIM : 1321700029

**Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul :

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Juli 2019

Hormat saya,

KARMANI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-nya tesis ini dapat disusun dan diselesaikan. Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh dorongan dan dukungan semangat baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada yang terhormat :

- Kedua orang tua saya (Djani Kromosentono dan Suparmi) yang tiada henti atas doa-donya kepada saya agar menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- Bapak Dr. Mulyonto Nugroho, MM., CMA.,CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberi makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
- Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini.
- Seluruh Jajaran Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang tiada pernah lelah dan berhenti Menstransfer Ilmunya bagi saya dan teman –teman khususnya MH 39.
- Seluruh staf Tata Usaha yang telah banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Hukum Angkatan 39, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas kebersamaan kita yang telah saling membantu, memberikan semangat, menginspirasi , dan mendoakan tetap semangat dan terima kasih.

- Istri saya tercinta (Siti Rofi'ah) dan Putra Putri tercinta saya (Sekar dan Bambang Trisucahyono) yang telah banyak memberi dukungan bagi saya dari awal saya kuliah sampai tesis ini selesai.
- Teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Hukum Angkatan 39, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas kebersamaan kita yang telah saling membantu, memberikan semangat, menginspirasi , dan mendoakan tetap semangat dan terima kasih.
- Pimpinan saya di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda Nomor 8 Sidoarjo, serta rekan-rekan Auditor yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penyusunan tesis ini. Dan terimakasih atas kerjasama tukar informasi dan pengalaman dalam segala hal membuat kita saling belajar serta semangat untuk shering menambah meningkatkan SDM di teman-teman Auditor sehingga terselesainya penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan berkat dan anugrah-Nya berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut diatas. Saya sangat menyadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan atau belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 17 Juli 2019

Karmani

ABSTRACT

Formation Of Village Clinics As An Effort To Prevent Village Fund Corruption Crimes

The development of the progress of the Regulations and the paradigm of the Village Regional Government with the passing of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Central Government has the obligation to realize village programs through the provision of village budget funds by following up on Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the National Budget. It is expected that all village community interests and needs can be accommodated with greater opportunities for villages to manage their own governance. and equitable distribution of development is expected to improve the welfare and quality of life of rural communities, but has not been followed by the preparation of human resources (HR) both village heads and their tools to understand the implementation of regulations that are always evolving so that there is a lot of misuse of village funds management by village heads and village officials who entered the realm of law, namely to Law Enforcement Officials (APH).

The purpose of this study was to determine and analyze the position of village clinics in East Java as an effort to prevent not criminal corruption of village funds. This research method focuses on the study or study of positive law (statutory law) that is normative.

The result is expected that the village head and village apparatus are able to properly manage village finances in accordance with applicable regulations so as to minimize the forms of errors both administrative and non-administrative and provide input on improving and improving village fund management. It is expected that the existence of village clinics as an effort to prevent criminal acts of village funds corruption.

Keywords: Village Clinic, Prevention of crime, Village Fund Corruption.

RINGKASAN

PEMBENTUKAN KLINIK DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Perkembangan berjalannya Era-reformasi dan paradigma Pemerintahan Daerah Desa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk mewujudkan program desa melalui pemberian anggaran dana desa dengan ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan diberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun belum diikuti dengan persiapan Sumber daya manusia (SDM) baik kepala desa maupun perangkatnya untuk memahami implementasi peraturan yang selalu berkembang sehingga banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang masuk ke ranah hukum yaitu ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan klinik desa di Jawa Timur sebagai upaya pencegahan tidak pidana korupsi dana desa.

Metode penelitian ini menitikberatkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat normatif.

Hasilnya diharapkan Kepala desa dan perangkat desa mampu mengelola keuangan desa secara benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administrasi maupun non administrasi dan memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya klinik desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa

Kata Kunci: Klinik Desa, Pencegahan tindak pidana, Korupsi Dana Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.5.1. Penelitian Terdahulu.....	12
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Masalah	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.7.Pertanggungjawaban Sistematika	21
Bab II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP.....	23
2.1. Landasan Teori	23
2.1.1. Teori Negara Hukum	23

2.1.2. Teori Kebijakan Kriminal.....	31
2.1.3. Teori Keadilan Bermartabat	40
2.2. Penjelasan Konsep.....	45
2.2.1. Pengertian Klinik Desa	45
2.2.2. Kebijakan Keuangan Desa.....	47
2.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa	82
2.2.4. Dana Desa	85
2.2.5. Tindak Pidana Korupsi	88
Bab III PEMBAHASAN	91
3.1. Ratio Legis Dibentuknya Klinik Desa	91
3.1.1. Dasar dibentuknya Klinik Desa	91
3.1.2. Tujuan Pembentukan Klinik Desa.....	111
3.2. Kedudukan Klinik Desa sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa.....	119
3.2.1. Upaya pencegahan korupsi Dana Desa.....	119
3.2.2. Peranan Klinik Desa sebagai upaya pencegahan Korupsi dana desa.....	129
3.2.3. Peran APIP dan APH dalam pencegahan tindak Pidana Korupsi	132
Bab IV PENUTUP	135
4.1. Kesimpulan	135
4.2. Saran	136
DAFTAR BACAAN	138